

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bandung adalah kota terbesar yang ada di Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Bandung merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Dimata dunia, kota Bandung sangat terkenal dengan tempat diadakannya konferensi Asia Afrika yang pertama pada tahun 1955.

Bandung sendiri diambil dari kata “Bendung” dalam Filosofi Sunda, Kata “Bendung” berasal dari kalimat “Nga-Bendung-an Banda Indung” kalimat ini merupakan kalimat yang sangat sakral dan luhur, karena kalimat ini mengandung nilai ajaran Sunda. “Nga-Bendung-an” berarti bersaksi, memperhatikan, menyaksikan, “Banda” berarti Benda atau segala sesuatu yang ada di bumi ini, dalam kalimat ini bumi diartikan Sebagai “Indung”.<sup>1</sup>

Kota Bandung sebenarnya merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Bandung pada tahun 1810 oleh Bupati R. A. Wiranatakusumah II setelah berpindahnya pusat kota dari Krapyak ke tepi selatan Jalan Pos. Alasan pemindahan ini adalah karena Krapyak tidak strategis sebagai ibu kota, karena terletak di sisi selatan daerah bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.<sup>2</sup>

Dari sektor pendidikan, Bandung juga menjadi salah satu tujuan pendidikan, hal ini dikarenakan banyaknya sarana-sarana pendidikan seperti universitas yang mana memiliki kredibilitas yang tidak diragukan, bahkan Bandung juga termasuk salah satu Kota Pelajar setelah Yogyakarta. Hal tersebutlah yang melatar belakangi kerjasama-kerjasama internasional yang dilakukan oleh Bandung, salah satunya adalah kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig yang memang cikal bakalnya berasal dari kerjasama pendidikan, kerjasama yang dilakukan antara Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Indonesia dengan (*Padagogishe*) di Kota Braunschweig Jerman, yang mana kerjasama ini dipelopori dan atas rekomendasi Prof. Dr. George Eckert. Maka lambat laun terbentuklah kerjasama *sister city* seperti sekarang ini.

---

<sup>1</sup> Kota Bandung, tersedia dari ([artikata.com/arti-14767-bandung.html](http://artikata.com/arti-14767-bandung.html)) diakses pada 19 September 2016, 19.00 WIB.

<sup>2</sup> Sejarah Kota Bandung, tersedia dari (<http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=pemerintah.detail&id=326>) diakses pada 19 September 2016, 19.00 WIB.

Di mata Indonesia sendiri, Kota Bandung adalah Kota yang pertama yang menjalin kerjasama luar negeri oleh pemerintah lokal. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama internasional yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Braunschweig pada tahun 1960. Kerjasama ini pada awalnya merupakan kerjasama atas rekomendasi Prof. Dr. George Eckert yang pada waktu itu menjabat sebagai salah satu staff di UNESCO, hal ini berpijak bahwa di kedua kota ini terdapat perguruan tinggi keguruan (*Padagogishe*) di Braunschweig dan di Bandung terdapat perguruan tinggi pendidikan guru (PTPG) yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kerjasama universitas ini, menghasilkan banyak dampak positif, seperti saling membantu memperbanyak literasi buku-buku yang dijadikan untuk melengkapi perpustakaan di masing-masing universitas. Pengembangan potensi dengan mengadakan penelitian bersama dan sebagainya. jadi awal terbantuknya hubungan kerjasama kedua kota ini merupakan hubungan kerjasama antar universitas.

Sampai pada tanggal 24 Juni 1959, pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Atase Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Marjoenani, mengemukakan keinginan untuk meresmikan persahabatan antar kedua kota (Bandung-Braunschweig) tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Mei 1960 di museum Kota Braunschweig dilaksanakan upacara khusus mengenai peresmian persahabatan kedua kota tersebut, yang mana pada waktu itu Indonesia diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia Dr. Zairin Zain, dan dari pihak Jerman diwakili oleh Hans Gunther Weber (Walikota Braunschweig). Di Bandung sendiri piagam persahabatan ini di tandatangani langsung oleh Walikota Bandung, Bapak R. Priatnakusumah.<sup>3</sup>

Ikatan persahabatan yang telah berjalan kurang lebih selama 40 tahun telah menghasilkan banyak kemajuan. Hasil positif ini bisa dirasakan oleh warga kedua kota kembar ini, selain menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, Bandung juga memiliki keunggulan dalam bidang pariwisata, industry kuliner, dan *fashion*. Tetapi dalam perjalanannya, kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig tidaklah berjalan Mulus. Ada beberapa faktor penyebab atau hambatan dalam kerjasama *sister city* ini.

---

<sup>3</sup> “Sister city Braunschweig”, tersedia di, <http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=berita.detail&id=660> diakses pada tanggal 19 September 2016, 19.00 WIB

Krisis utang yang melanda eropa telah merubah wajah perekonomian negara-negara anggotanya, krisis ini memang pada perkembangannya melanda hampir seluruh Negara Eropa termasuk Jerman. Hal ini yang kemudian menyebabkan kemunduran terhadap kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. kerjasama ini pada kenyataannya sering mengalami kondisi yang stagnan atau jalan di tempat atau bisa dibilang vakum, dalam artian setiap program yang akan dijalankan selalu sebatas peninjauan, tidak pernah menghasilkan suatu perjanjian atau MoU yang baru.

Masalah lainnya juga timbul di Kota Bandung itu sendiri seperti adanya tumpang tindih atau berbelit-belitnya birokrasi di Kota Bandung, seperti, ketika Kota Bandung kedatangan delegasi dari Kota Braunschweig pada Februari 2017 lalu, sebetulnya pihak Braunschweig akan memberikan bantuan untuk PDAM Tirtawening Kota Bandung, namun dalam hal ini PDAM Tirtawening ternyata tidak semerta-merta dapat langsung menyetujui bantuan tersebut, harus ada izin dari instansi-instansi lainnya dan itu tidak mungkin dilakukan dengan waktu yang singkat yang akhirnya hanya sebatas peninjauan. Pandangan sebagian orang Indonesia model seperti ini sangat lumrah dilakukan, namun berbeda halnya dengan pandangan pemerintah Kota Braunschweig yang memandang bahwa hal seperti ini merupakan gambaran ketidak seriusan pemerintah Bandung atas bantuan kerjasama yang diberikan Kota Braunschweig.

Masalah lainnya adalah adanya pengurangan anggaran *sister city* di Kota Bandung. Dalam wawancara awal yang dilakukan penulis dengan Bidang Kerjasama Kota Bandung, penulis menemukan fakta bahwa adanya pengurangan anggaran kerjasama yang sangat signifikan anggaran yang sebelumnya mencapai 10 milyar di potong menjadi hanya 100 juta. Hal ini sangat berdampak terhadap kerjasama Kota Bandung dengan Kota Braunschweig Jerman. Fakta lain yang penulis temukan juga menyebutkan bahwa ternyata masyarakat Kota Bandung kurang atau sangat sedikit yang mengetahui kerjasama *sister city* ini.

Kurangnya sosialisasi mungkin menjadi faktor yang paling di soroti dalam kerjasama Bandung-Braunschweig ini, bagaimana tidak, kerjasama *sister city* yang pertama dan terlama di Indonesia ini ternyata masih banyak yang belum mengetahuinya, masyarakat Kota Bandung khususnya, masih sangat sedikit yang mengetahui kerjasama ini. Dibandingkan dengan *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu, Fort worth mungkin bisa dibilang kedua kota

tersebut lebih dikenal oleh masyarakat Kota Bandung dibanding *sister city* Kota Bandung dengan Kota Braunschweig.

Masalah yang lain yang terjadi di Kota Bandung adalah adanya *political will* yang berbeda-beda setiap walikota, dalam wawancara penulis dengan salahsatu narasumber di Kota Bandung menyebutkan bahwa keinginan politik yang berbeda-beda yang membuat setiap kerjasama *sister city* di kota Bandung menjadi tidak kondusif, ketika pergantian kepemimpinan, maka berganti pula program kerja meraka, hal ini bisa dilihat ketika ada beberapa kunjungan dari Braunschweig ke Bandung, yang menyambut bukanlah dari pimpinan teras walikota, seperti Walikota atau wakilnya, padahal menurut narasumber sebelumnya telah ada pemberitahuan dan kesepakatan bahwa yang akan menyambut adalah walikota, hal ini yang kemudian menimbulkan asumsi bahwa memang pada walikota saat ini Braunschweig bukanlah prioritas utama dalam kerjasama *sister city* di Kota Bandung.

Tidak adanya landasan kerjasama yang baru dan yang lebih menarik juga menjadi salah satu faktor penyebab seringnya kerjasama ini mengalami stagnansi, dalam wawancaranya Deutch Club bersama Elke Gerlach pengurus bagian kerjasama International Kota Braunschweig menyebutkan bahwa memang dahulu banyak sekali kerjasma yang dilakukan baik itu pertukaran pemuda maupun kedinasan, pada awalnya pertukaran dinas dilakukan selama satu tahun namun kemudian dikurangi menjadi 3 (tiga) bulan dan menjadi satu bulan. Begitu juga dengan pertukaran pemuda, pernah juga berjalan beberapa kali namun akhirnya terhenti, hal ini disebabkan oleh karena kurangnya ketertarikan pemuda dari pihak Braunschweig, hal ini karena kurangnya promosi dari Kota Bandung sendiri,

“banyak warga Braunschweig yang memiliki ketertarikan terhadap indoneisa dan mereka menginginkan adanya kerjasama dengan Indonesia, namun untuk Bandung pemuda kami masih sedikit yang mengetahui, jadi yang terpenting dalam suatu kerjasama adalah harus adanya kertertarikan awal terhadap suatu negara, agar hal ini lebih menarik untuk direalisasikan”.

Sehingga dari pemaparan diatas penulis melihat ada hal yang harus dilakukan, dimana penulis melihat adanya ketidak sehatan dalam kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig yang banyak masalah oleh karena itu terbentuklah sebuah rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas mengenai kerjasama internasional antara kota Bandung dengan Kota Braunschweig, maka dapat diambil sebuah *research question* sebagai berikut :

“Mengapa Kota Bandung melanjutkan kerjasama *sister city* dengan Kota Braunschweig, walaupun banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan kerjasama antara kota Bandung dan kota Braunschweig
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh pemerintah Bandung dan Braunschweig.
- c. Untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh kedua kota ini sebagai prospek dari kerjasama *sister city* ini.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara praktis : diharapkan bagi Kota Bandung dan Kota Braunschweig, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memaksimalkan kerjasama *sister city* kedua belah pihak.
- b. Secara akademk, tesis ini diharapkan akan menjadi bahan telaah dan kajian terhadap kerjasama *sister city* dimasa yang akan datang.

## **D. Studi Pustaka**

Dalam melakukan penulisan tesis ini penulis mencoba memberikan perbandingan tulisan ini dengan tulisan lain yang berkaitan tentang kerjasama intenasional dalam bentuk *sister city*, terutama yang membahas tentang kerjasama antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. Selain itu penulis juga mencoba me-*review* beberapa buku yang berkaitan dengan kerjasama model ini, walaupun sangat sedikit penelitian atau penulisan yang secara khusus membahas tentang kerjasama antara Kota Bandung dan Braunschweig, tetapi beberapa sumber dirasa cukup bagi penulis untuk digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Adapun studi pustaka yang digunakan dalam menjawab Mengapa Bandung mempertahankan kerjasama *sister city* dengan Braunschweig antara lain, Stivani Ismawira Sinambela (2014) dalam tesisnya di S2 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang)*. Kajian ini lebih memfokuskan pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan kerjasama Internasional dalam skema kerjasama *sister city* dan tidak membahas tentang peran kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dan Braunschweig. Tulisan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik tentang peran dari kerjasama *sister city*. Khususnya dalam kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dan Braunschweig.

Sidik Jatmika, dalam buku berjudul *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, mengatakan bahwa gelombang demokratisasi berhembus seperti angin yang bergerak menyebar ke penjuru dunia menebarkan gelombang perubahan dalam bentuk transisi politik dari sistem politik non demokratis berubah ke sistem politik demokratis. Dalam politik demokratis penulis melihat adanya pergeseran model diplomasi, dari tradisional diplomasi, menjadi diplomasi yang lebih modern di mana hal ini memudahkan bagi pemda untuk mengelola langsung kebijakan daerahnya dalam ranah dunia Internasional.

Didukung dengan adanya kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian menghasilkan otonomi daerah. Dimana kemudian otonomi daerah ini membawa peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan dunia Internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan kawasan. Jatmika mengatakan salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan agar daerah diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional.<sup>4</sup> walaupun dibebaskan dalam mengelola kerjasama Internasional, namun dalam perakteknya ada pengawasan dan pertimbangan dari DPRD seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 42 yang menyebutkan tentang tugas dan wewenang DPRD untuk mengawasi, memberikan pendapat dan pertimbangan serta menyetujui rencana kerjasama internasional yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian dari Joseph Nye Jr dkk, yang meneliti dampak kerjasama *sister city* ini. Ketika Peer Schouten mengajukan pertanyaan kepada Joseph Nye Jr. tentang, 'Dalam dunia internasional seperti apa, kita hidup saat ini?'. Nye menyatakan

---

<sup>4</sup> Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

bahwa dewasa ini kita hidup di jaman hibrid. Sebagian dari dunia kita yang positif-normatif, serta berbasis pada 'kedaulatan negara' adalah 'doktrin' *Westphalian*, sedangkan di bagian lain adalah model post-Westphalia, yang di dalamnya aktor-aktor transnasional dan norma-norma hukum humaniter internasional menerabas melintasi batas-batas kedaulatan negara. Kedua bagian ini tampaknya masih akan terjadi untuk beberapa dekade ke depan, sehingga analisis positive dan normatif yang baik akan mencakup keduanya.<sup>5</sup>

Perjanjian Westphalia atau *The Peace of Westphalia* atau *The Westphalia Treaty*, tahun 1648, German, yang mengakhiri Perang Eropa selama 30 tahun, berhasil memancang tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep '*nation-state*', dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern, yang disebut sebagai '*Westphalian System*'.<sup>6</sup> Doktrin Westphalian hasil dari perjanjian ini meliputi prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa, kemudian prinsip kesamaan di depan hukum bagi setiap negara, dan prinsip non-intervensi atas urusan internal negara lain. Sebagaimana dikatakan oleh Watson bahwa Perjanjian Westphalia melegitimasi persemakmuran negara-negara berdaulat, yang menandai kemenangan negara dalam mengendalikan masalah-masalah internalnya, dan menjaga kemerdekaannya secara eksternal. Perjanjian ini banyak melahirkan aturan dan prinsip politik bagi negara-negara baru.<sup>7</sup> Fakta historis tentang prinsip bernegara secara modern dalam '*The Westphalia Treaty*' ini bagi para pembelajar Ilmu Hubungan Internasional, terutama kalangan teoritis realist-tradisional, dianggap merupakan titik awal terjadinya studi Ilmu Hubungan Internasional modern.

Gugatan terhadap pendekatan para realist-tradisionalis takterbendung lagi seiring dengan semakin menyatunya sistem ekonomi dunia yang ditunjang dengan penyatuan sistem teknologi informasi dalam jaringan yang bersifat '*world wide*'. Demikian pula dengan perilaku masyarakat

---

<sup>5</sup> [Peer Schouten](#), Theory Talks is an initiative dalam Beberapa wawancara Theory Talks yang telah diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Theory Talks, Perbincangan Pakar Sedunia Tentang Teori Hubungan Internasional Abad Ke-21", Editor: Bambang Wahyu Nugroho dan Hanafi Rais, PPSK dan LP3M UMY, Yogyakarta, 2012

<sup>6</sup> Osiander, Andreas, '*Sovereignty, International Relations and Westphalian Myth*', International Organization 55, hal. 251, The IO Foundation and Massachusetts Institute of Technology, USA, Spring 2001

<sup>7</sup> [Watson](#), sebagaimana dikutip oleh Robert Jackson dan Georg Sorenson dalam, '*Introduction to International Relations*', Oxford University Press Inc., New York, 1999. Dalam edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2009

internasional yang semakin fleksibel, baik secara institusional maupun individual, untuk melakukan interaksi yang bersifat transnasional, dimana aktor-aktor pemerintahan lokal pun secara langsung ikut berinteraksi dengan pihak asing dalam kapasitasnya selaku *'sub-state actors'*, atau apa yang lebih dikenal sebagai *'paradiplomacy'*. Pertanyaannya adalah, bagaimana gambaran riil konstruksi hubungan antarbangsa saat ini, dan bagaimana aktor-aktor lokal dalam merespon interaksi transnasional itu?

Takdir Ali Mukti, dalam Buku *Paradiplomacy, kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, mengatakan bahwa hubungan internasional yang mewarnai system interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, individu maupun kelompok. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntunan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan pembagian kedaulatan dalam batas konstitusinya.<sup>8</sup>

Selain dari buku tersebut penulis juga me-*review* penelitian yang telah ada, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Jojo Juhaeni dengan judul penelitian “Perbandingan Tata Kelola Pemerintahan Antar Kota Lintas Negara (*sister city*) di Pemerintahan Kota Bandung”. Jojo membahas lebih banyak tentang tata kelola *sister city* Kota Bandung dengan berbagai kota kembarnya. Dalam akhir pembahasan, Jojo menjelaskan apa saja tentang kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa dalam kerjasama dengan model seperti ini masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat, baik dari segi program kerjasama, manfaat, dan pelaksanaannya bagi warga Kota Bandung. Sehingga hanya sedikit warga yang mengetahuinya, bahkan peneliti mengatakan bahwa sebagian besar warga Kota Bandung tidak mengetahui adanya program kerjasama Kota Bandung dengan kota di luar negeri maupun dalam negeri.

Dalam hal ini, penulis dengan peneliti memiliki persamaan perspektif tentang kerjasama ini. Namun ada juga perbedaannya. Untuk lebih mudah difahami, penulis menyederhanakan beberapa aspek dari para peneliti diatas.

---

<sup>8</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta.



Table 1.1  
Studi Pustaka

<b>Review/Aspek</b>	<b>Tempat</b>	<b>Waktu</b>	<b>Fokus Kajian</b>
	Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung atau tepatnya di Bidang Kerjasama Balai Kota Bandung	Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan jangkauan penelitian dari tahun 2010	Kajian ini difokuskan kepada alasan-alasan Kota Bandung dalam mempertahankan kerjasama <i>sister city</i> dengan Kota Braunschweig
Jojo Juhaeni	Penelitian yang dilakuan Jojo ini Bertempat di bagian umum kota Bandung	Penelitian ini dilakukan dalam kunjungan ilmiah pada tahun 2009	Kajian ini difokuskan pada perbandingan pelaksanaan tata kelola <i>sister city</i> kota Bandung
Stivani Ismawira Sinambela	Penelitian dalam tesis Stivani ini mengambil tempat di Kota Medan dan Komisaris Jendral Malayasia di Medan	Penelitian ini dilakakukan pada tahun 2014 dengan jangkauan penelitian dari tahun 2010	Kajian ini lebih difokuskan kepada proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam kerjasama Internasional, dan lebih kepada kerjasama antara Kota Medan dan Pulau Penang.
Ika Ariani Kartini	Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung	Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswi S2 di Universitas Gajah Mada pada tahun 2012	Kajian ini lebih memfokuskan pada penerapan public governance di pemerintah kota Bandung namun tidak membahas banyak tentang kerjasama Bandung dengan Braunschweig.
Sidik Jatmika	Buku ini disusun di Yogyakarta dan mengambil studi kasus antara lain Jawa Timur dan Australia Barat, dan Bukit Tinggi dan Seremban	Buku ini di terbitkan pada tahun 2001	Fokus kajian dalam buku otonomi daerah ini adalah pembahasan no 22 tahun 1999 dan lebih difokuskan pada bagaimana penempatan daerah sebagai aktor baru dalam interaksi kerjasama internasional, ada beberapa studi kasus dalam buku ini, antara lain Bukit Tinggi-Seremban, dan Provinsi Jawa timur dan Australia Barat.
Takdir Ali Mukti	Penulisan buku ini bertempat di Yogyakarta dengan memfokuskan studi kasus di Provinsi Yogyakarta.	Buku Pradiplomasi ini di terbitkan pada tahun 2013	Kajian pada buku Paradiplomasi ini difokuskan kepada pembahasan 4 aspek, aspek teoritis hubungan internasional, aspek diplomasi, dan dari aspek praktis pembuatan kerjasama internasional.

Maka dari itu, dengan adanya penelitian-penelitian dan buku-buku di atas, penulis merasa cukup untuk membuat suatu gagasan baru di akhir penelitian ini.

## E. Kerangka Teori

Pada pembahasan dalam penelitian ini, tentunya penulis menggunakan satu teori dan satu konsep untuk membantu menjelaskan fenomena yang ada dalam memecahkan permasalahan. Sehingga teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: konsep paradiplomasi dan teori model pengambilan keputusan. Berikut penjelasan teori dan konsep tersebut.

### 1. Konsep Paradiplomasi

Diplomasi memiliki arti yang sangat luas dan mencakup beberapa kegiatan. Menurut Dictionary.com, diplomasi dapat diartikan sebagai suatu Keahlian, atau keterampilan dan kehati-hatian yang mana semua ini perlu dimiliki oleh setiap pelaku diplomasi untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di luar negeri.<sup>9</sup>

Menurut Takdir Ali Mukti dalam bukunya *Paradiplomasi Kerjasama Internasional oleh Pemda di Indonesia* menyebutkan bahwa paradiplomasi adalah desentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administratif dalam proses yang terjadi pada sub nasional, atau lembaga-lembaga politik, atau kebijakan publik, dalam otoritas yang berbeda di bawah kendali pemerintah pusat<sup>10</sup> namun hal ini berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara. Paradiplomasi tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, terlebih untuk menunjukkan masalah yang lebih spesifik dengan tanpa melanggar aturan tentang negara yang berdaulat tetapi kerjasama ini untuk membebaskan pemerintah daerah untuk menentukan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Namun masih dibawah kendali pemerintah pusat dan mengikuti system internasional yang berlaku. Hal ini lah yang kemudian disebut pradiplomasi.

John Revenhill dalam bukunya *Paradiplomacy in Action, the Foreign Relations of Sub National Governments* menjelaskan bahwa paradiplomasi adalah alat untuk memahami hubungan luar negeri yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah (sub nasional) yang memiliki tujuan tertentu dalam berbagai bidang atau di khususkan

---

<sup>9</sup> Arti kata Diplomasi, tersedia di (<http://dictionary.reference.com/browse/diplomacy>) diakses pada 20 November 2016, 07 .00 WIB.

<sup>10</sup> Mukti, Takdir Ali, '*Paradiplomasi Kerjasama internasional oleh Pemda di Indonesia*'. The Phinisi Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, p. 15.

untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya namun masih dalam pengawasan pemerintah pusat dalam rangka menghadapi globalisasi.<sup>11</sup>

Steffan Wolf dalam Jurnal yang dikeluarkan oleh *Bologna Center of International Affair*. Mengungkapkan bahwa paradiplomasi mengacu pada Kebijakan Luar negeri yang dilakukan oleh sub negara di kancah internasional yang bertujuan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri bukan untuk kepentingan nasional.<sup>12</sup>

Menurut Ivo Duchacek dalam Bukunya "*Perforated Sovereignities: Towards a Typology of New Actors in International Relations*" yang dikutip dari Hans Michael Mann "*federalism and International Relations The Role of Sub-national Units*, Hans Michelmann *paradiplomacy sister city Bandung and Braunschweig*" is:

*Global Paradiplomacy is Diplomacy that performed by sub-national governments in a country with sub-national governments in other countries, either both nationally and second sub region countries not bordering.*

Sementara itu Panayotis Soldatos di sebuah penjelasan kerangka Studi Negara Federal sebagai actor kebijakan luar negeri: Peran Unit *sub-national*, Hans Michalemann, menjelaskan Faktor-faktor paradiplomasi ini meliputi<sup>13</sup>:

1. Usaha kedua belah pihak untuk mencapai tujuan berdasarkan perbedaan geografi, budaya, agama, bahasa, politik, dan faktor-faktor lain yang berbeda dengan daerah lain di negara mana sub aktor itu berada. Serta pada dasarnya bahwa meskipun

---

<sup>11</sup> Ed. Keating, Francisco Aldecoa and Michael. '*Paradiplomacy in Action*'. New York: Frank Cass and Co. Ltd., 2013.

<sup>12</sup> Journal of International Affairs, Bologna Center, accessed on 15 Desember 2016 05.00 WIB available from: (<http://bcjournal.org/volume-10/paradiplomacy.html>)

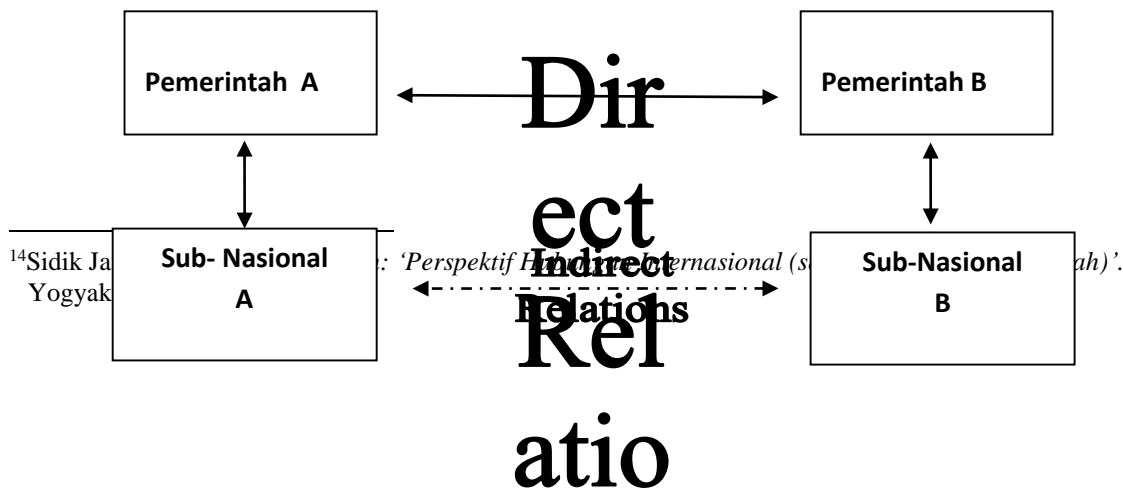
<sup>13</sup> Soldatos, Panayotis, "*An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors*: dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos (ed), '*Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*', Clarendon Press, Oxford, 1990, dikutip dari buku, Paradiplomasi, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia, Takdir Ali Mukti, The Pinisi Press, Yogyakarta, 2013

persepsi ini terkait dengan segmentasi objek tetapi lebih di dorong oleh faktor politik juga.

2. Adanya ketidakseimbangan dan representatif unit sub nasional dan unit nasional di hubungan internasional.
3. Perkembangan ekonomi dan kelembagaan secara alami di unit sub nasional dari pemerintah daerah mampu mendorong untuk mengembangkan perannya.
4. Kegiatan diplomasi bisa termotivasi oleh fenomena internasional yang dapat dengan mudah ditafsirkan untuk mengikuti peringkat pada hal-hal yang membuat sub unit nasional lainnya.
5. Adanya kesenjangan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan inefisiensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di pemerintah pusat.
6. Masalah yang terkait dengan pembangunan bangsa dan konstitusional juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan paradiplomasi.
7. Domestikasi kebijakan luar negeri sebagai akibat dari isu-isu politik yang diusulkan telah memotivasi pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan melakukan paradiplomasi.

Paradiplomasi dapat dikatakan kerjasama langsung antar daerah di negara dengan wilayah di negara-negara lain, tidak langsung di sini berarti dalam hal pelaku, disebut tidak langsung karena aktor yang melakukan hubungan ini adalah sub nasional (pemerintah daerah), bukan Pemerintah Pusat, sebagai hasil dalam skema berikut:

Gambar 1.1  
Skema Hubungan Paradiplomasi<sup>14</sup>



## **2. Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)**

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berfikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Keputusan itu sendiri merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang dihadapi dengan tegas. Pengambilan keputusan adalah pengambilan kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena jika hanya ada satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang diambil.

Menurut Suhernan, pengambilan keputusan adalah proses memilih dan atau menentukan berbagai kemungkinan diantaranya situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih<sup>15</sup>. Senada dengan Suherman, Graham T Allison dalam bukunya “*Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*”, mengajukan tiga model pengambilan keputusan, yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik, berikut ini uraiannya:

### **1. Model Aktor Rasional**

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang di ambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-

---

<sup>15</sup> Suhernan. *Psikologi Kognitif*. Srikandi, 2005.

alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan secara rasional, kelemahannya asumsi ini mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokratnya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi. Allison sadar kelemahan itu sehingga beliau mengajukan model lainnya, yaitu model “proses organisasi” dan “politik birokratik”.

## **2. Model Proses Organisasi**

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi. Dalam model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, lebih merupakan proses mekanik, keputusan merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu (*standard operating procedure*).

Organisasi ini pada dasarnya bersifat konservatif dan jarang yang mau mencoba sesuatu yang baru, umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil. Salah satu cara untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian masalah adalah dengan melakukan tindakan seperti sebelumnya, organisasi cenderung memiliki pedoman, buku petunjuk yang berisi bagaimana caranya organisasi mengatasi masalah, apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi sebelumnya.

## **3. Model Politik Birokratik**

Dalam model ini PLN (Politik Luar Negeri) dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. PLN adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi, *bargaining game* antar bangsa, dengan kata lain pembuatan keputusan PLN adalah proses sosial, bukan intelektual. Jadi dalam Model III ini digambarkan suatu proses dimana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional, setiap aktor negara berusaha menetapkan tujuannya, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan secara intelektual, tidak ada pemain yang bisa memperoleh apa yang diinginkan dalam *bargaining* ini (bisa dianalogikan permainan catur).

Karena dalam Model III ini menekankan *bargaining games* sebagai penentu PLN, maka dalam mempelajarinya kita harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, kekuasaan dan *manuver* dari pemain-pemain yang terlibat didalamnya. Jadi kita harus tahu (a) *Siapa yang ikut bermain? atau kepentingan atau perilaku siapa yang punya pengaruh terhadap keputusan.* (b) *Apa yang menentukan sikap masing-masing pemain itu.* (c) *Bagaimana sikap-sikap para pemain itu diaggresikan sehingga menghasilkan keputusan?.*

Tabel 1.2  
Outline Model Pembuatan Keputusan Graham T. Allison

	Model		
	Aktor Rasional	Proses Organisasi	Politik Birokratik
Paradigma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Didasari oleh tujuan dan sasaran (fungsi Tujuan)</li> <li>• Tersedia Alternatif</li> <li>• Konsekuensi dari tiap alternative</li> <li>• Memilih alternative yang dianggap paling baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi yang memutuskan</li> <li>• Tujuan sasaran keputusan</li> <li>• Prosedur Oprasi Standar (SOP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pemain dalam posisi masing masing</li> <li>• Tujuan, kepentingan, taruhan, masing masing actor</li> <li>• Kekuasaan</li> <li>• Saluran aksi</li> </ul>
Dasar Unit analisis keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi pemerintah sebagai pilihan terbaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi pemerintah sebagai output organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi pemerintah sebagai resultan dari proses politik</li> </ul>
Konsep yang mengatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actor rasional</li> <li>• Permasalahan</li> <li>• Aksi sebagai pilihan rasional</li> <li>• Tujuan dan sasaran</li> <li>• Pilihan-pilihan</li> <li>• Konsekuensi</li> <li>• Alternative yang dipilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actor-aktor organisasi sebagai konstelasi pemerintah</li> <li>• Unsur permasalahan dan pemilihan kekuasaan prioritas dan persepsi yang sempit</li> <li>• Aksi sebagai output organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pemain dalam posisi masing-masing</li> <li>• Prioritas dan persepsi yang sempit</li> <li>• Tujuan dan kepentingan</li> <li>• Taruhan dan tempat berdiri</li> <li>• Kekuasaan</li> <li>• Saluran aksi</li> <li>• Aturan pemain</li> <li>• Aksi sebagai repolitik</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pengendalian terpusat</li> <li>• Keputusan dari pimpinan pemerintah</li> </ul>	
Pola kesimpulan dominan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi pemerintah yang dipilih sesuai dengan sasaran/tujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi pemerintah dalam jangka pendek merupakan output yang lebih luas, ditentukan oleh POS dan Program-Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksi pemerintah merupakan resultan dari tawar menawar</li> </ul>
Proporsi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efek Substansi</li> <li>• Dipilih sesuai dengan peningkatan atau penurunan cost.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diimplementasikan oleh organisasi.</li> <li>• Pilihan-pilihan organisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultan politik, aksi dan Hubungan hubungan.</li> </ul>

Sumber: <https://pusdiklatbkt.wordpress.com/2013/01/18/analisis-konflik-dan-resolusi-konflik-di-aceh>

## F. Hipotesa

Dengan melihat kompleksitas masalah tentang Kota Bandung mempertahankan kerjasama *sister city* dengan Kota Braunschweig walaupun banyak hambatan, karena:

### 1. Ada kesamaan karakteristik antara Bandung dan Braunschweig.

- a) Pendidikan
- b) Wisata
- c) Budaya

### 2. Adanya manfaat-manfaat yang didapat Kota Bandung

- a) Kerjasama Universitas
- b) Pengolahan Limbah

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai salah satu metode bagi penulis dalam memperoleh data yang diperuntukan untuk menulis tesis ini. Metodologi penelitian mencakup beberapa aspek yang dijelaskan dibawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, metode ini bertujuan menggambarkan fakta-fakta yang dilakukan pemerintah Bandung dan Braunschweig terhadap program *sister city*

### 2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian



Untuk menghindari pelebaran dalam pembahasan mengenai prospek kerjasama Kota Bandung dengan Braunschweig terhadap perkembangan kota, peneliti mencoba mencari tahu langkah dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan setelah dilakukan pembaharuan perjanjian pada tahun 2010.

### 3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di lakukan secara langsung dan tak langsung. Secara langsung pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara tokoh yang memiliki kemampuan pada bidang atau salah satu bidang yang di pandang penting dalam riset ini. Pengumpulan data secara tidak langsung di lakukan secara *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan menyangkut dengan penelitian yang sedang di lakukan. *Library research* dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, laporan instansi terkait, berita media cetak dan elektronik, webside resmi pemerintah yang bertanggungjawab dan berbagai sumber lain yang dipandang perlu dalam penelitian ini. Berhubung penelitian ini adalah deskripsi dan ekspalanasi maka validitas harus sangat jelas dalam menampilkan permasalahan yang terjadi baik dari hulu hingga ke hilir.

#### a. Dokumen

Dokumen dalam artian segala sesuatu data tertulis dan gambar yang menyangkut permasalahan yang sedang di teliti. Dokumen melibatkan referensi-referensi yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang di teliti.

#### b. Observasi

Observasi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data-data primer secara langsung dan objektif dalam penelitian ini.

#### c. Wawancara

Informan dipilih berdasarkan kemampuan khusus yang dimiliki personal atau instansi terkait, sehingga dalam hal ini pemerintah terkait, dan ilmuan yang berkompetensi dengan kerjasama model ini, dalam hal ini penulis melakukan wawancara ke beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut diantaranya yaitu warga Kota Bandung secara umum dan acak, pemerintah Kota Bandung, dan beberapa aktivis *sister city* di Kota Bandung.

#### 4. Teknik Analisi Data

Penulisan analisis data dilakukan secara kualitatif. Sehingga dalam hal ini didapatkan hasil yang lebih akurat dan bisa saling melengkapi satu sama lain untuk menarik sebuah kesimpulan akhir.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I menjelaskan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, tinjauan pustaka, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II penulis tentang kerjasama *sister city* Kota Bandung dengan Braunschweig, dan menjelaskan bagaimana dinamika politik pemerintahan di Kota Braunschweig dan Kota Bandung.

BAB III penulis menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan kerjasama *sister city* di Kota Bandung, dan bagai mana proses mekanisme pembuatannya sehingga bisa menghasilkan perjanjian MoU dan menjelaskan tentang Hambatan-hambatan dalam kerjasama *sister city* Bandung-Braunschweig ini.

BAB IV pada bab ini penulis membahas secara umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang alasan-alasan mengapa Bandung mempertahankan *sister city* dengan Braunschweig.

BAB V penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan dari awal pembahasan bab pertama sampai terakhir dan penulis akan memberikan keritik serta saran.